



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

**Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi  
Internasionalisasi Isu Papua**

Skripsi

Oleh

Tania Febrina

2014330102

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

**Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi  
Internasionalisasi Isu Papua**

Skripsi

Oleh

Tania Febrina

2014330102

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Tania Febrina  
Nomor Pokok : 2014330102  
Judul : Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi Internasionalisasi Isu Papua

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 11 Juli 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

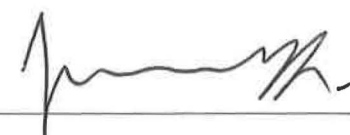
**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**  
Dr. I Nyoman Sudira

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tania Febrina

NPM : 2014330102

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi Internasionalisasi Isu Papua

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi Internasionalisasi Isu Papua”** merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 Juni 2018



Tania Febrina

## ABSTRAK

**Nama :** Tania Febrina

**NPM :** 2014330102

**Judul :** Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi Internasionalisasi Isu Papua

---

Permasalahan di Papua muncul atas dasar pemikiran dan ambisi rakyat Papua untuk merdeka. Ada 4 persoalan yang menyebabkan munculnya konflik: Pertama adalah sejarah integrasi Papua, kedua adalah pelanggaran HAM, ketiga adalah kegagalan pembangunan ekonomi, dan terakhir adalah identitas melanesia. Rakyat Papua merasa didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Indonesia. Pergolakan telah terjadi antara NKRI dan Kelompok Separatis Papua (KSP) sejak masa PEPERA tahun 1969 hingga kini. Karena konflik berlarut-larut, maka yang pada awalnya hanya terjadi secara domestik kini telah menjalar menjadi konflik Internasional. Konflik Papua kemudian menjadi sorotan utama masyarakat terutama setelah KSP bergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang memiliki tujuan untuk melancarkan gerakan kemerdekaan Papua di luar negeri. Berkat gerakan separatisme ULMWP yang gencar, pada akhirnya masyarakat internasional memandang bahwa penyebab utama munculnya tuntutan Papua Merdeka adalah karena pemerintah Indonesia dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) rakyat Papua. Berbagai cara diupayakan oleh ULMWP untuk dapat mencapai tujuannya tersebut, salah satunya melalui kegiatan forum dan publikasi media. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menghindari adanya internasionalisasi isu Papua. Dalam Penelitian ini, Penulis akan menggunakan teori Azar yang mendasarkan argumentasi konflik yang berkepanjangan, dan Gledistch yang menekankan pada aspek internasionalisasi konflik. Penulis akan menganalisa isu-isu domestik yang menginternasional dan memberikan pengaruhnya terhadap Negara-negara tetangga.

Kata kunci: Kondisi, Internasional, Situasi, Papua, Internasionalisasi, Isu Papua

**ABSTRACT**

**Nama :** Tania Febrina

**NPM :** 2014330102

**Judul :** *International Condition and Situation in Papua that Trigger The Internationalisation of Papuan Issue*

---

*Conflict in Papua appear on the basis and ambition of the Papuan people for independence. There are four problems that cause the conflict: First is the history of Papua, second is human rights violations, third is the economic and development problems, and the last is the identity of melanesia. Papuans feel discriminated and experience unjust treatments by the Indonesian government. The upheaval has occurred between Indonesia and the Papuan Separatist Group (KSP) since the PEPERA period of 1969 until present. Due to protracted conflicts, the conflict that was once a domestic conflict has now become an international conflict. The Papua conflict then became an important spotlight to the international society after KSP joined the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) which aims to launch the Papuan independence movement abroad. Because of the hard work of the separatist movements especially ULMWP, ultimately the international community already recognizes that the main cause of Free Papua is because of the violation of human rights by the Indonesian government. Various ways that ULMWP strives to achieve these goals: one of them through forum activities and media publications. This indicates that the Indonesian government can not avoid the problem of internationalization of Papua. In this study, author will use the theory of Azar on protracted social conflict, and theory of Gledistch on internationalization of the conflict. Author will analyze domestic and international factors as a push and pull factors of the internationalization of the Papua conflict.*

**Keywords:** *International, Situation, Condition, Papua, Internationalisation, Issue*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi Isu Papua”. Ketertarikan penulis untuk menulis Konflik Papua dikaitkan dengan faktor domestik dan internasional yang kemudian membawa konflik tersebut menjadi konflik internasional adalah karena topik ini merupakan masalah yang belum pernah ada ditulis sebagai suatu skripsi di bidang ilmu hubungan internasional dan masih menjadi permasalahan hingga saat ini.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Adapun tujuan pengambilan topik Papua adalah agar pembaca dapat memahami bahwa hingga saat ini konflik Papua belum kunjung reda. Bahkan sebaliknya, konflik tersebut terus berkembang hingga menjadi konflik internasional sehingga mendapat perhatian dari negara-negara luar dan didukung oleh negara-negara tersebut untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyelesaian penulisan skripsi.

Bandung, 20 Juni 2018

Tania Febrina

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah membuat skripsi berjudul “Kondisi Internasional dan Situasi di Papua yang Mempengaruhi Internasionalisasi Isu Papua” mampu terealisasi dengan baik. terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar tidak terlepas dari campur tangan Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si. selaku dosen pembimbing selama enam bulan terakhir yang senantiasa sabar memberikan waktu, arahan, dan dukungannya.

Dorongan untuk mengangkat isu berangkat dari keprihatinan peneliti terhadap kondisi masyarakat Papua yang hingga kini masih mengalami keterpurukan dan kian diabaikan keberadaannya di tengah masyarakat, sehingga menempatkan mereka sebagai salah satu kelompok minoritas di Indonesia. Konflik Papua yang tidak kunjung usai pada akhirnya mendorong rakyat Papua untuk bertindak dengan menuntut Indonesia untuk memisahkan diri dari NKRI. Di samping itu, skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Peneliti menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan doa dan moral berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih peneliti hendak sampaikan kepada:

- Allah SWT yang senantiasa saya andalkan dalam setiap proses pembelajaran dari awal hingga kini di UNPAR,
- Mama Asri Damayanti dan Ayah Berlian Helmy. Orangtua yang selalu berdoa dan memberi dukungan demi kelancaran pembuatan skripsi putri tunggalnya. Alasan dibalik perjuangan seorang Tania dalam memberikan prestasi terbaik selama masa perkuliahan dan dua sosok yang paling dihindari untuk dibuat kecewa. Thank you Mom and Dad for the endless support and prayers. I'll give you my best, Love you 😊
- Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si Terima kasih banyak Mas untuk segala motivasi, kesabaran, dan saran yang sudah Mas curahkan selama proses



bimbingan, berlangsungnya sidang, hingga skripsi ini akhirnya mampu terselesaikan dengan hasil memuaskan. Maaf ya Mas kalau setiap minggu Tania bawel banyak bertanya hehe☺

- Para sahabat-sahabatkuu (Joanna Kasinta, Nyimas Rika, Maria Claudia, dan Annabel Maria). Yang sama-sama berjuang ngerjain skripsi, sampe janjiin pergi ke café berkali-kali tujuannya buat ngerjain skripsi ujung-ujungnya malah ngobrol dan foto-foto hahaha. Yang selalu sama-sama nanya satu sama lain mengenai skripsi dan sering nanya udah sampai. Selalu ada di kala suka dan dukanya aku. Selalu support aku dan memberi banyak nasihat buat aku. Thank you for all tears and jokes you guys. I'll definitely never forget all those memories. I'll see you guys on top!
- Special thanks for Andromeda Sain. Terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, dampingan dan selalu nggak pernah lupa nagih Tania dengan pertanyaan "kapan lulus?"hehe tapi gapapa kamu sudah membuat Tania termotivasi dan giat ngerjain skripsinya. Makasih juga udah selalu menguatkan Tania melewati hari-hari kuliah dan hari-hari mengerjakan skripsi sehingga bisa dikerjakan dengan lebih ringan dan semangat. Tak disangka dari awal banget skripsi ini masih kosong sampai selesai kamu selalu ada buat aku ndro. We've been gone through thick and thin together and being with each other for quite a while. You are more than just company or partner and I'm sure we will have a lifetime hell of a ride together. Much love.
- Internet Society Geng (Eja, Abel, dan Rika). Berawal sebagai rekan seperjuangan prakdip dan berakhir sebagai keluarga. Terima kasih kawan sudah menjadi bagian dari masa-masa terbaik Tania selama berkuliah di HI UNPAR. Jadi inget masa-masa struggle Prakdip tapi seru dan dapet banget funnya!
- Dan kepada orang-orang terkasih dan memiliki kontribusi penting dalam masa perkuliahan saya lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih.

Sebagaimana pribahasa mengatakan tak ada gading yang tak retak. Demikian pula skripsi ini masih perlu disempurnakan dan sangat terbuka dengan berbagai kritik maupun saran membangun dari berbagai pihak. Akhirnya peneliti berharap skripsi ini bukan hanya memperkaya wawasan, namun juga menggerakkan kesadaran para penstudi hubungan internasional terhadap sekitarnya.

Bandung, 20 Juni 2018

Peneliti

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK..... iii

ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Pertanyaan Penelitian .....	10
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.5.2 Kegunaan Penelitian .....	11
1.6 Kajian Literatur .....	11
1.7 Kerangka Pemikiran.....	16
1.8 Metode Penelitian.....	28
1.8.1 Metode Penelitian Kualitatif.....	28
1.8.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.9 Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II : KONFLIK PAPUA : ISU DAN AKTOR-AKTOR TERLIBAT .....</b>	<b>31</b>
2.1 Isu Utama dalam Konflik Papua .....	32
2.1.1 Sejarah Integrasi Papua.....	32
2.1.2 Pelanggaran HAM di Papua.....	37
2.1.3 Kegagalan Pembangunan Ekonomi .....	39
2.1.4 Identitas Melanesia .....	42
2.2 Aktor-aktor yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua .....	43
2.2.1 Diaspora Papua .....	45

2.2.2	Melanesian Spearhead Group ( MSG).....	47
2.2.3	Hubungan Indonesia dan Pasifik Terkait Konflik Papua.....	50
2.2.4	United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) .....	51
2.2.4.1	Personil ULMWP dan Alasan Partisipasinya.....	53
2.2.4.2	Pergerakan yang di lakukan ULMWP .....	56
<b>BAB III : ANALISA TEORI :FAKTOR DOMESTIK DAN INTERNASIONAL</b>		
<b>DALAM INTERNASIONALISASI KONFLIK PAPUA.....</b>		<b>57</b>
3.1	Faktor Internal yang Mendorong Internasionalisasi Isu Papua. ....	59
3.2	Faktor internasional yang menarik internasionalisasi konflik Papua.....	76
3.3	Konflik Papua setelah Internasionalisasi.....	79
<b>BAB IV .....</b>		<b>82</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>		<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>87</b>

**DAFTAR SINGKATAN**

HAM	: Hak Asasi Manusia
OAP	: Orang Papua Asli
KSP	: Kelompok Separatis Papua
PEPERA	: Penentuan Pendapat Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Polri	: Polisi Republik Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Otsus	: Otonomi Khusus
BBM&J	: Buton, Bugis, Makassar dan Jawa
ULMWP	: United Liberation Movement for West Papua
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
KNPB	: Komite Nasional Papua Barat
NRFPB	: Negara Republik Federal Papua Barat
PDP	: Presidium Dewan Papua
WPNCL	: West Papua Coalition for Liberation
WPNA	: West Papua National Authority
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
MSG	: Melanesian Spearhead Group
PIF	: Pacific Islands Forum
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
TAPOL	: Tahanan Politik
AWPA	: The Australia West Papua Association
UNTEA	: United Nations Temporary Executive Administration
FLKNS	: Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste

FFA	: The Forum Fisheries Agency
SPC	: The Secretariat of The Pacific Community
SOPAC	: The South Pacific Applied Geoscience Commission
USP	: The University of South Pacific
SPTO	: The South Pacific Tourism Organisation
PIDP	: The Pacific Island Development Programme
NPWP	: National Parliament of West Papua
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PSC	: Protracted Social Conflict
UNTEA	: United Nations Temporary Executive Authority
DMP	: Dewan Permusyawaratan Penentuan
OPSUS	: Operasi Khusus
PNG	: Papua New Guinea
POLSEK	: Polisi Sektor
NGO	: Non-Government Organisation
NSA	: Non State Actor
ACP-UE	: African Carribean Pacific – Uni Eropa

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penelitian ini menggambarkan bagaimana proses internasionalisasi dari konflik Papua terjadi karena dipicu oleh faktor domestik dan faktor internasional. Di mana konflik tersebut telah menjadi isu yang penting untuk dikaji dalam studi hubungan internasional. Penulisan dan penelitian ini dibagi ke dalam empat bab. Masing-masing bab dapat menjelaskan secara terperinci mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, teori, konsep, serta metode yang digunakan dalam penelitian, hingga menghasilkan hasil penelitian.

Awal dari rangkaian tulisan peneliti dimulai dalam bab ini, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan di Papua hingga kini belum menemukan penyelesaian, sudah hampir 32 tahun konflik yang terjadi masih menjadi isu yang diperhatikan. Adanya bentrok kepentingan antara pemerintahan Indonesia yang ingin menjaga kesatuan NKRI dan keinginan rakyat Papua yang ingin melepaskan diri dari Indonesia menjadi penyebab utama adanya konflik. Permasalahan tersebut merupakan bagian dari konflik internal yang didefinisikan sebagai sebuah konflik yang terjadi di dalam sebuah negara.<sup>1</sup> Isu Papua ini melibatkan pemerintah dan militer, konflik bersenjata

---

<sup>1</sup> Angstrom, Jan. 2001. *Review Article: The International Dimensions of Ethnic Conflict.*

antar etnik dan klaim kemerdekaan, terlibatnya organisasi radikal yang mengganggu kedaulatan negara, dalam hal ini Indonesia. Konflik tersebut selalu terjadi hingga saat ini.<sup>2</sup> Rakyat Papua merasa kebebasannya termarginalisasi, konflik internal cenderung sulit diselesaikan dan dapat mempengaruhi negara-negara tetangga, yang nantinya dapat berubah menjadi konflik eksternal.

Konflik yang terjadi di Papua tidak dapat dibiarkan berlangsung terlalu lama. Masyarakat asli Papua mengalami depopulasi, di mana terjadi penurunan populasi secara signifikan akibat kedatangan masyarakat non-Papua dalam jumlah besar, juga akibat konflik bersenjata. Konflik tersebut juga dikenal dengan *ethnic division of labor*.<sup>3</sup> Semenjak datangnya para pendatang seperti kelompok “BBM&J” atau kepanjangannya adalah Buton, Bugis, Makassar dan Jawa, seluruh wilayah Papua dikuasai oleh suku-suku tersebut. Selain itu, BBM&J juga memperoleh pendapatan yang lebih besar dibanding dengan masyarakat Papua Asli. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki pekerjaan selayaknya para pendatang.

Untuk menangani konflik Papua Pemerintah melakukan 2 pendekatan : pendekatan keamanan dan pendekatan ekonomi. Pendekatan keamanan dapat disebut juga sebagai *negative peace*. Yang dimaksud dengan *negative peace* adalah Pemerintah menyelesaikan konflik tersebut dengan kekuasaan, militerisasi dan kekerasan senjata. Menurutnya, Perang adalah satu-satunya cara untuk

---

Studies in Conflict and Terrorism. United Kingdom: Taylor and Francis.

<sup>2</sup> Syamsuddin Ishak, Otto dan Sudira, I Nyoman. 2012. *Oase Gagasan Papua Damai*. Imparsial : Jakarta, Indonesia. Hlm 162-163

<sup>3</sup> McDonell Michael. 2012. The Racial Division of Labour in the Global Political Economy. Directed Readings in Sociology – Final Paper. British Columbia, Canada. Labour Studies, Simon Fraser University.



menyelesaikan masalah. Namun pada faktanya perang bukanlah solusi efektif bagi penyelesaian masalah di Papua, perang justru memperbesar kemarahan rakyat Papua yang kemudian berujung pada perpecahan dan saling menyakiti satu sama lain. Konflik mungkin dapat diselesaikan, namun banyak korban berjatuhan. Semakin tinggi tindakan militer pada Papua maka semakin tinggi permusuhan.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan uang yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan triliunan uang kepada Papua untuk otonomi khusus namun hasil dari hal tersebut tidak ada yang memberi pengaruh positif kepada Papua.<sup>5</sup>

Konflik internal dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik misalnya jika dilihat tidak banyak orang Papua yang mampu duduk di parlemen maupun jabatan – jabatan pemerintahan, hal ini yang membuat aspirasi masyarakat Papua kurang tersalurkan karena memang sedikit sekali orang yang menyampaikan aspirasi masyarakat Papua. Dari segi ekonomi pun kurang meratanya distribusi pembangunan dari pusat ke tanah Papua sehingga mengakibatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua kurang merata. Sedangkan jika dari segi sosial adalah ketika kita melihat kurangnya sarana pendidikan dan kesehatan yang mengakibatkan banyak masyarakat Papua yang tidak memperoleh hak-haknya secara penuh.

Di sisi lain, konflik di tanah Papua memiliki dimensi internasional. Dampak yang ditimbulkan dari konflik Papua menjadi perhatian masyarakat internasional,

---

<sup>4</sup> Sudira, I Nyoman. *Seminar Resolusi Konflik Papua melalui Pendekatan Perdamaian*. Makalah disajikan dalam rangka membahas perdamaian Papua dengan cara dialog, LIPI, Imparsial, Universitas Katolik Parahyangan. 2018.

<sup>5</sup> Ibid

dan hal ini menjadi momentum yang seringkali dimanfaatkan bagi kepentingan negara lain. Konflik eksternal dapat mengubah garis hubungan antar negara seperti contoh Australia yang mendukung Papua dengan tujuan yaitu untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan adanya kerenggangan dalam hubungan Indonesia dan Australia. Ini kemudian mengindikasikan beberapa negara kuat lainnya juga akan terlibat intens jika terjadi eskalasi kekerasan dalam konflik Papua, seperti halnya Amerika Serikat yang memiliki peranan kuat di Papua mengingat keberadaan Freeport di Papua.<sup>6</sup>

Konflik memang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada dalam setiap aspek kehidupan manusia. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan, baik dari segi pandangan, nilai, pemikiran hingga ras. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perpecahan dan diskriminasi yang kemudian dapat memunculkan rasa disudutkan atau diperlakukan tidak sama dan tidak adil.

Di masa lalu, jika dilihat dari segi sejarah, konflik identik dengan perang antar negara atau lebih menjurus kepada konflik eksternal. Namun seiring berjalannya waktu, konflik antar negara terus mengalami penurunan, sebaliknya, yang mengalami peningkatan saat ini adalah konflik internal negara atau konflik yang terjadi di dalam negara.<sup>7</sup>

Konflik etnis merupakan salah satu konflik internal yang marak terjadi di dalam negara. Beberapa negara memiliki suku yang beragam atau multi-ethnic. Keberagaman tersebut yang kemudian menciptakan kelompok-kelompok di dalam

---

<sup>6</sup> ibid. halaman 164-165

<sup>7</sup> Sudira, I Nyoman, Op cit.

masyarakat yang kemudian menimbulkan adanya kelompok minoritas dan kelompok mayoritas.<sup>8</sup>

Indonesia merupakan sebuah negara dengan masyarakat plural. Menurut ekonom Inggris, J.S. Furnival yang kemudian dilanjutkan oleh seorang antropolog bernama M.G Smith, berkaca dari pengalaman negara multi-etnis, Biasanya terdapat pesimisme dalam sebuah negara dalam membangun masyarakat yang stabil dan demokratis. Penyebabnya diyakini adalah karena perbedaan bahasa, aturan, nilai, dan tradisi sehingga menimbulkan adanya ketidakcocokan. Peran pemerintah Indonesia untuk membangun negara multi etnis yang stabil dan demokratis sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya perpecahan yang dapat berujung pada terbaginya wilayah.<sup>9</sup>

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan bergejolaknya konflik papua teridentifikasi beberapa persoalan yang harus di hadapi akan semakin memperburuk konflik tersebut. Persoalan pertama adalah semakin mempertegas status Indonesia sebagai negara yang memiliki konflik internal. Konflik internal adalah sebuah kekerasan bersenjata yang terjadi atau yang mengancam terjadi terutama di dalam batasan satu negara bagian. Contoh dari konflik internal adalah kekerasan yang melibatkan pemimpin sipil atau militer karena perebutan hak kekuasaan, Dalam hal ini, tidak dapat dihindari konflik etnis bersenjata yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya, ancaman organisasi

---

<sup>8</sup> Ryan, Stephan. 1995. *Approaches to Ethnic Conflict :Ethnic Conflict and International Relations*. London, England :Dartmouth Publishing Company; Subsequent Edition. Hlm 29.

<sup>9</sup> Ibid. Hlm 31.

radikal, dan tindakan revolusi. Aktor dari terjadinya konflik internal melibatkan pemerintah dan kelompok pemberontak.<sup>10</sup>

Persoalan kedua adalah korban dari konflik. Kalau konflik ini tidak memiliki penyelesaian, tentu saja akan berlangsung memakan korban, baik nyawa ataupun infrastruktur yang menjadi terbengkalai. Jika pertentangan terus menerus terjadi dan kedua belah pihak masih terus bertikai otomatis kegiatan militer berjalan bersamaan dengan tindak perlawanan. Akibatnya semakin banyak korban yang jatuh seperti contoh yang sudah terjadi adalah kasus Operasi Wibawa, Operasi Kikis dengan kasus Wamena tahun 1977, dan Operasi Sapu Bersih tahun 1984 selain itu juga kasus pembantaian Biak tahun 1998 dan kasus Waisor tahun 2008.<sup>11</sup>

Persoalan ketiga adalah berlarut-larutnya konflik akan semakin menjauhkan masyarakat Papua dari kesejahteraan ekonomi. Karena konflik tidak kunjung diselesaikan, maka kekerasan di wilayah tersebut akan terus menerus terjadi. Sepanjang konflik dilakukan dalam bentuk kekerasan dan perlawanan, maka hal penting lainnya seperti pembangunan ekonomi akan terhambat lebih dari itu pembangunan ekonomi tidak ditempatkan menjadi hal yang utama. Pembangunan ekonomi yang terhambat kemudian menyebabkan wilayah tersebut tidak berkembang dan mengalami kemunduran. Sehingga Papua tertinggal jauh di bandingkan wilayah di Indonesia lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Brown, Michael E. 1996. *The International Dimensions of internal conflict*. Cambridge, MA : MIT Press. Hlm 1.

<sup>11</sup> Affan, Heyder. 2016. Janji Penyelesaian 11 Pelanggaran HAM di Papua. *BBC News Indonesia (online)*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2018.

<sup>12</sup> Konflik Papua dan Masalah Kesejahteraan Masyarakat, Mohammad Teja, halaman 11

Persoalan selanjutnya adalah penyelesaian persoalan HAM yang menjadi terbengkalai. Orang Papua Asli (OAP) memiliki persoalan tersendiri dari masa lampau dengan TNI dan Polri karena perlakuan kasar dan kekerasan yang sudah dialami oleh OAP yang dilakukan oleh TNI dan Polri.<sup>13</sup> Hasil PEPERA tahun 1969 yang tidak sesuai dengan harapan OAP membuat OAP geram dan berusaha menyampaikan aspirasinya. Hasil PEPERA dibuat tanpa melibatkan suara rakyat OAP. Hasil PEPERA diperoleh melalui paksaan melalui intimidasi dan ancaman oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan pemberontakan dari masyarakat OAP terhadap pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memerdekakan diri. Namun keinginan rakyat Papua tersebut di tindak secara tegas secara oleh militer pemerintah Indonesia. Tindakan perlawanan yang dilancarkan oleh TNI dan Polri kepada para pemberontak tersebut memakan korban dalam jumlah yang besar. Serangan-serangan TNI dan Polri kepada OAP inilah yang dianggap melanggar HAM.<sup>14</sup>

Terakhir adalah semakin menguatnya internasionalisasi. Konflik domestik antara sipil (rakyat asli Papua pro-Kemerdekaan) dengan militer (Pemerintah Indonesia) mengalami eskalasi. Eskalasi konflik semakin menguat ketika penduduk Papua merasa termarginalisasi, menjadi minoritas dan semakin terpojok di tempatnya sendiri akibat kedatangan penduduk non-Papua yang besar-besaran.<sup>15</sup> Sedangkan pemerintah Indonesia sampai saat ini masih mempertahankan dan memperkuat kekuatan militernya di Papua sehingga perdamaian antara Indonesia dan

---

<sup>13</sup>Situmorang, Mangadar. 2012. *Oase Gagasan Papua Damai*. Imparsial: Jakarta. Hlm 202.

<sup>14</sup> Otto Syamsudin Ishak dkk (Forum Akademisi untuk Papua Damai). 2012. *Oase Gagasan Papua Damai*. Jakarta : Imparsial. Hlm 120.

<sup>15</sup>Situmorang, Mangadar. *Oase Gagasan Papua Damai*. Imparsial. 2012. hlm 204.

Papua sulit diwujudkan. Maka dari itu masyarakat Papua sendiri dapat melihat bahwa konflik ini tidak akan kunjung terselesaikan dan kepentingannya tidak akan terwujud alias menjadi stagnan karena Indonesia tidak akan pernah mau mendengarkan aspirasi rakyat Papua.

Rakyat Papua pun bertindak lebih jauh dan lebih tegas lagi yaitu dengan mempromosikan kepentingannya di negara-negara tetangga serta mencari dukungan untuk merdeka dari negara-negara tersebut. Rakyat Papua mencari simpati kepada negara-negara tersebut dengan cara membawa-bawa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia kepada Papua dan hak untuk menjadi wilayah yang merdeka. Sehingga konflik Papua kemudian menjadi konflik internasional.<sup>16</sup>

Papua hingga saat ini masih berupaya untuk melepaskan diri dari Indonesia (NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ada beberapa alasan terkait mengapa Papua hingga saat ini berupaya untuk melepaskan diri dari NKRI. Hal tersebut dapat ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ketidakadilan dan ketidakmerataan distribusi faktor-faktor di atas menjadi salah satu hal utama yang menjadi alasan bagi terbentuknya gerakan-gerakan separatisme di Indonesia.<sup>17</sup> Faktor lain adalah masih banyak masyarakat papua yang tidak mampu mengenyam pendidikan padahal jika dilihat secara geografis papua termasuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun mereka tidak mampu mengolahnya. Kekayaan alam yang seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat papua asli justru dinikmati oleh kalangan pendatang dan Papua tetap

---

<sup>16</sup> Enggar Dwi Ammy JF. Strategi Media Relations Divisi Penerangan Sosial Budaya (PENSOSBUD) KBRI Australia Terkait Pemberitaan Kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM). Surabaya, Indonesia : Universitas Airlangga.

<sup>17</sup> Loc cit. Forum Akademisi untuk Papua Damai. hlm 60

menjadi daerah yang dianggap terbelakang dan kurang menjadi perhatian oleh Pemerintah Indonesia.<sup>18</sup>

Masyarakat Papua juga mengalami trauma masa lampau. Trauma di akibatkan oleh kejahatan masa lalu dalam bentuk tentangan dan kekerasan dari kalangan militer (TNI). Memang pada faktanya, Kasus HAM yang terjadi pada masyarakat Papua di masa lalu sebagian besar melibatkan militer sebagai pelakunya. Namun kasus-kasus di masa lalu yang dilakukan oleh TNI tersebut dirahasiakan hingga saat ini. Dengan demikian, pelanggaran HAM di masa lalu tersebut menjadi suatu keganjalan yang mempengaruhi hubungan Jakarta–Papua karena belum tercapainya hak-hak orang Papua untuk kebenaran dan keadilan.<sup>19</sup>

Pemerintah Indonesia sudah mulai mengintensifkan upaya dalam meredakan konflik Papua dengan cara membuat isu ini menjadi salah satu prioritas. Pemerintah akan meluncurkan pendekatan diplomatik pada negara-negara tetangga untuk meminta dukungan terkait dengan integritas wilayah Indonesia termasuk provinsi Papua.<sup>20</sup>

Permasalahan Papua pada dasarnya bukanlah masalah kesejahteraan. Pemerintah telah cukup memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua dengan memberikan dana yang relatif banyak di era Otonomi Khusus Papua. Yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah adalah permasalahan politik di Papua, bukan ekonomi. Permasalah politik yang terjadi ini adalah perbedaan perlakuan dan kebijakan antara orang Papua dan non Papua. Hal ini menunjukkan

---

<sup>18</sup> Situmorang Mangadar, *ibid.* Hlm 199

<sup>19</sup> Syamsuddin Ishak, Otto dan Sudira, I Nyoman. *Ibid.* Hlm 71.

<sup>20</sup> Tebay, Neles Kebedabi. 2001-2011. *Papua Case in the Eyes of the European Commission :Angkat Pena Demi Dialog Papua*. Jakarta : Institut Dian/Intefidei. Hlm 15.

bahwa orang Papua memiliki aspirasi politik yang harus diperhatikan, bukan saja kebutuhan kesejahteraan yang harus diakomodir. Dalam politik, sebagian besar dikuasai oleh kaum mayoritas Indonesia antara lain contohnya yang berasal dari kaum Jawa; namun hanya segelintir saja orang Papua yang diberi kesempatan untuk bersuara di dalam politik. Hal ini menyulutkan kemarahan rakyat Papua karena telah merasa tidak diakui oleh Indonesia.<sup>21</sup>

Atas dasar 4 persoalan yang sudah diidentifikasi diatas maka cukup argumentatif secara akademis untuk memfokuskan kajian ini dalam faktor-faktor yang menginternasionalisasi papua.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus pada rumusan masalah yang ada, dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai faktor-faktor domestik dan internasional sebagai pemicu berlarutnya konflik di Papua yang kemudian membawa isu tersebut menjadi isu internasional. Waktu yang difokuskan penulis dalam penelitian ini adalah dimulai dari terbentuknya PEPERA hingga Organisasi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) berkembang.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimanakah Kondisi Internasional dan Situasi di Papua Mempengaruhi Internasionalisasi Isu Papua?

---

<sup>21</sup> Siregar, Latifah Anum. 2013. *Menuju Papua Tanah Damai, Perspektif Non-Papua*. Jayapura, Papua : Aliansi Demokrasi untuk Papua. Hlm 18-19.



## **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi internasionalisasi Isu Papua baik dari dalam internal Papua itu sendiri ataupun internasional. Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai awal penyebab dari terjadinya internasionalisasi konflik Papua yang bermula dari isu domestik Papua.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat membantu penulis untuk lebih memahami hubungan teori-teori yang penulis aplikasikan seperti Azar dan Gleditsch terhadap konflik yang tengah dibahas. Selain itu, penulis juga berharap agar tulisan ini dapat membantu para peminat studi konflik untuk lebih memahami dan menjadikannya referensi pembelajaran serta dapat menambah wawasan tentang Papua dan akar permasalahan konflik yang terjadi selama ini.

## **1.6 Kajian Literatur**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kajian literatur sebagai sumber penulis dalam memulai penelitian. Kajian Literatur yang pertama berjudul “Initiating Peace Process in Papua” yang di tulis oleh Timo Kivimaki : <sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Kivimaki, Timo. 2006. *Initiating A Peace Process in Papua : Actors, Issues, Process, and The Role of The International Community*. Washington, D.C.: East West Center. Hlm 1-88.

### **Initiating Peace Process in Papua : Actors, Issues, Process and The Role of The International Community – Timo Kivimaki**

Perjanjian Damai Helsinki Agustus 2005 untuk Aceh menunjukkan bahwa proses perdamaian untuk konflik di Papua sangat mungkin dan harus segera diaktualisasikan. Timo Kivimaki, telah meneliti bahwa dialog merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menemukan formulasi dan mempromosikan proses perdamaian untuk konflik di Papua. Hal tersebut terinspirasi dari Perjanjian Damai Aceh yang dapat dikatakan telah berhasil dilakukan. Menurut Kivimaki tidak ada salahnya jika proses perdamaian dilakukan melalui dialog. Melalui studi komprehensif tentang konteks, kekerasan berturut-turut tidak akan menyelesaikan konflik. Buku ini berpendapat bahwa dengan mengikuti metode Perjanjian Damai Aceh dimana dialog digunakan, maka dialog memungkinkan untuk digunakan sebagai langkah pertama menuju penyelesaian damai dari konflik Papua.

Penulis memulai bukunya dengan mengidentifikasi dua kekuatan separatis di Papua: Kelompok pertama adalah kelompok-kelompok perjuangan militan, dan kelompok kedua adalah kelompok-kelompok separatis yang berbasis ideologi, lebih demokratis, dan tidak terlalu menggunakan kekerasan. Pada awal buku ini penulis juga memeriksa wawasan konseptual yang berbeda berkaitan dengan konflik secara umum serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamikanya. Penulis menerapkan beberapa konsep kunci sebagai alat untuk analisis konflik. Menurut penulis konflik itu berupa "penyimpangan", "persepsi musuh" dan "kekerasan" ketiga hal tersebut menentukan bahwa orang Papua memandang orang Indonesia sebagai musuh karena orang Indonesia dianggap agresif, arogan, dan tidak toleran. Sedangkan orang

Indonesia sendiri melihat orang Papua sebagai kaum primitif karena pakaian, adat dan cara hidup mereka yang dianggap masih sangat terbelakang. Penyimpangan dan citra musuh antara orang Indonesia dan orang Papua adalah fakta yang tak terbantahkan. Hal tersebut telah memotivasi konflik berkepanjangan yang telah diwarnai oleh sejumlah kekerasan. Penulis melanjutkan untuk menganalisis kemungkinan mewujudkan dialog sebagai jalan paling tepat untuk perdamaian. Selanjutnya, Kivimäki memfokuskan studi untuk memutuskan aktor dan institusi mana yang harus dilibatkan dalam dialog Papua mendatang. Penulis berpendapat bahwa para aktor yang mungkin relevan dengan dialog perdamaian Papua adalah mereka yang memiliki agenda politik, agama, budaya atau sosial kolektif. Oleh karena itu, para aktor yang harus dilibatkan dalam dialog adalah: 1) kekuatan pro-Indonesia; 2) anggota gerakan perlawanan, seperti OPM (Gerakan Papua Merdeka) dan jenis kelompok perlawanan baru seperti organisasi hak asasi manusia, kelompok lingkungan, organisasi Kristen.

Setelah para perwakilan dipilih, diidentifikasi dan didiskusikan, keluhan-keluhan di inti perselisihan kekerasan antara pendukung dan penentang kekuasaan Indonesia di akan dibahas. Untuk mempelajari keluhan-keluhan itu, Timo Kivimäki menggolongkan kelompok-kelompok itu ke dalam dua kategori: kelompok-kelompok yang secara langsung terkait dengan motivasi orang (kadang egoistis atau partikular) untuk menggunakan kekerasan terhadap kelompok lain dan mereka yang berbagi motivasi kolektif untuk seluruh Papua. Motivasi yang terdahulu berhubungan dengan kesetiaan pada sesuatu: paroki, suku, peran gender atau subjek. Yang terakhir ini lebih mendasar, karena membentuk konteks untuk keseluruhan

perselisihan tentang integrasi dan separatisme. Secara sistematis, penulis memulai dengan "tingkat keluhan yang dapat ditolerir", misalnya: keluhan politik individu, kolektif, historis, umum, dan bergerak ke inti atau "tak tertahankan" pengaduan seperti keluhan politik tertentu, keluhan keamanan dan keluhan ekonomi.<sup>23</sup>

Kajian literature yang kedua merupakan sebuah artikel yang dilansir dari *University of Melbourne: Indonesia at Melbourne* dan dipublikasi pada bulan agustus, 2017. Artikel ini berjudul "No end to violence in Papua?", ditulis oleh Hipolitus Yolisandri Ringgi Wangge seorang peneliti di marthinus akademi Jakarta.

#### **No end to violence in Papua? – Hipolitus Yolisandri Ringgi Wangge**

Artikel ini membahas mengenai aparat kepolisian yang menembak seorang warga papua asli. Ia menjelaskan bahwa HAM warga papua sudah tidak lagi di perhatikan oleh pemerintah (Presiden Joko Widodo).

Lemahnya penegakan HAM di Papua bermula ketika Polisi tersebut menembak orang asli papua tersebut tanpa adanya tembakan peringatan dan hanya langsung menembak ke arahnya. Orang papua asli tersebut bernama Yulianus Pigai. Kekerasan pihak kepolisian terhadap warga papua asli masih terus berlanjut. Bahkan ratusan dan ribuan polisi dan militer masih terus dikirim ke papua oleh pemerintah untuk 3 tujuan : pertama adalah untuk melindungi asset negara yaitu tambang Freeport, kedua adalah untuk merespon tindakan OPM atau organisasi lain yang mengancam, dan yang terakhir adalah untuk mencegah terjadinya konflik horizontal diantara orang papua asli atau keturunan dan sesama warga papua, bahkan antara orang Asli Papua dengan masyarakat pendatang.

---

<sup>23</sup> Kivimaki, Timo. Ibid.

Jokowi disini lebih memperhatikan pembangunan papua secara ekonomi yaitu dengan membentuk beberapa economic policies : termasuk membentuk proyek infrastuktur besar-besaran dan menerapkan one fuel price policy. Sebenarnya yang harus diperhatikan di Papua bukanlah persoalan ekonomi namun lebih tepatnya adalah kebijakan hak asasi manusia yang harus lebih ditegakkan. Presiden berpikir bahwa permasalahan di papua adalah kemiskinan dengan solusinya adalah membebaskan masyarakat Papua dari kemiskinan. Oleh karena itu, permasalahan dianggap selesai dengan solusi ekonomi padahal, isu yang terjadi jauh lebih kompleks daripada itu. Masalah kepercayaan warga papua dengan pemerintah tidak berasal dari kemiskinan namun berasal dari perasaan takut (insecurity) yang mereka alami karena hidup ditengah ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, yang kemudian memunculkan trauma.

Penduduk asli Papua akan terus dibunuh selama pemerintah pusat tidak memiliki kemauan politik atau kapasitas untuk lebih mengkoordinasikan institusi nasional dan memprioritaskan isu hak asasi manusia di Papua.<sup>24</sup>

Dari dua literature yang sudah di review diatas dua-duanya sangat menarik menurut penulis. Literatur pertama membahas mengenai dialog sebagai sebuah cara yang tepat untuk meredam konflik Papua sedangkan literature kedua membahas mengenai pelanggaran HAM rakyat Papua dan aksi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, Dari kedua literatur tersebut belum ada yang membahas tentang

---

<sup>24</sup>Yolisandri Ringgi Wanggae , Hipolitus. 2017. *No End To Violence In Papua?*. Indonesia at Melbourne. Melbourne, Australia : The University of Melbourne.

internasionalisasi konflik Papua sehingga dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai internasionalisasi konflik Papua.

### 1.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba memaparkan teori dan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian. Teori yang ada dalam sub bab ini dapat digunakan untuk menjaga keterikatan proses penelitian dengan objek penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian secara berurutan. Penulis menggunakan teori Edward Azar dan teori Gledistch. Dilanjutkan dengan konsep internasionalisasi dan diaspora.

Konflik adalah bagian interaksi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Konflik tidak dapat terjadi tanpa melibatkan dua pihak atau lebih. Tujuan atau pendapat berbeda di antara pihak yang terlibat serta kurangnya koordinasi dan tidak tercapainya mediasi menyebabkan terjadinya konflik. Dalam artian luas, konflik dapat melibatkan individu, masyarakat, organisasi serta negara.<sup>25</sup>

Kini penulis akan menjelaskan mengenai teori Azar *Protracted Social Conflict (PSC)*. Berdasarkan pemikiran Edward Azar Teori ini terbentuk melalui analisisnya mengenai penderitaan berlarut-larut serta kekerasan yang dialami oleh kelompok komunal untuk berjuang mendapatkan hak-hak dasarnya seperti keamanan, pengakuan/ penerimaan, akses yang adil dalam institusi politik dan partisipasi politik.<sup>26</sup> Teori PSC memiliki empat variable : 'Communal Content',

---

<sup>25</sup> E. Azar. 1990. *Protracted Social Conflict : An Analytical Framework*. Aldershot : Dartmouth. Hlm 5

<sup>26</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse, Tom. 2011. *Contemporary Conflict Resolution: Third Edition*. United Kingdom: Polity. Hlm 71

‘Deprivation of human needs’, ‘Governance and the state’s role’, dan ‘International Linkages’.<sup>27</sup>

Pertama adalah *Communal Content*. Yang dianalisa oleh Azar disini adalah identitas sebuah kelompok yang dilihat berdasarkan ras, agama, etnis, budaya dan sebagainya. Permasalahan utamanya terfokus kepada hubungan antara kelompok minoritas dengan pemerintah. Beberapa negara merupakan negara dengan penduduk multietnis, dan di dalamnya terdapat kelompok mayoritas dan kelompok minoritas seperti contohnya Indonesia yang merupakan negara multietnis karena memiliki beragam suku. Kelompok mayoritas di Indonesia adalah suku Jawa sedangkan kelompok minoritas adalah suku Papua – Alasannya adalah karena jumlah penduduk Papua yang tidak sebesar suku Jawa. Poin pertama teori Azar atau *Communal Content* ini menjelaskan bahwa kelompok mayoritas tersebut kemudian mendominasi segala aspek yang ada di dalam sebuah negara serta kemudian mengacuhkan/tidak merespon kebutuhan kelompok lain/minoritas didalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga yang seringkali terjadi adalah terjadi perpecahan diantara kelompok masyarakat di dalam sebuah negara.<sup>28</sup>

Kedua adalah *deprivation of human needs*. Tidak seperti kepentingan, kebutuhan (needs) merupakan sebuah keharusan dan tidak dapat di negosiasi. Sehingga harus dipenuhi dan tidak dapat dihindari.<sup>29</sup> Jika terjadi konflik maka kemungkinan dipastikan akan selalu intens, ganas dan irasional. Azar kemudian mengutip kebutuhan dalam beberapa hal yakni keamanan, perkembangan, akses

---

<sup>27</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse. Ibid. Hlm 72

<sup>28</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse. Ibid. hlm 73

<sup>29</sup> Situmorang, Mangadar. 2012. Oase Gagasan Papua Damai. Imparsial: Jakarta. Hlm 206.

pada politik, dan pengakuan identitas. Selain itu juga 3 hak dasar sebagai manusia harus dipenuhi seperti keamanan, kehidupan dan kebebasan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah rakyat Papua tidak terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya tersebut. Seperti contohnya, belum terlihatnya kebebasan berserikat dalam berpolitik, belum terciptanya penghidupan yang layak secara optimal dan merata, kurang terpenuhinya sarana infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan perekonomian secara menyeluruh, tingkat kebahagiaan rakyat Papua yang masih rendah akibat belum diperolehnya layanan kesejahteraan yang memadai.<sup>30</sup> Rakyat Papua juga membutuhkan pengakuan dan penghormatan atas identitasnya dalam masyarakat Indonesia.<sup>31</sup>

Ketiga adalah *Governance and the state's role*. Poin ini dapat mengindikasikan tingkat kepuasan atau frustrasi kebutuhan suatu kelompok masyarakat. Kebanyakan dari negara yang mengalami PSC cenderung adalah negara yang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Pemerintah diharuskan untuk mendapat kepercayaan masyarakatnya dan dapat memimpin negaranya secara efektif lalu memperlakukan seluruh anggota politik secara adil dan sama serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi namun untuk poin ini tidak terimplementasi di Indonesia karena mayoritas hanya suku Jawa yang berpartisipasi dalam politik sedangkan suku Papua hampir tidak memiliki akses terhadap politik, dan selanjutnya adalah monopoli kekuatan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Situmorang, Mangadar. Loc.cit. hlm 207.



dan membatasi akses kelompok minoritas dapat mempercepat krisis legitimasi. Sehingga pemerintah di haruskan untuk lebih memperhatikan kepada poin-poin yang sudah di jabarkan diatas untuk menghindari adanya konflik etnis.<sup>32</sup>

Terakhir dari teori PSC adalah *International Linkages*. Dibagian ini dianalisa bahwa diantara negara ada hubungan kerjasama dalam bidang politik-ekonomi dan ketergantungan ekonomi didalam sistem ekonomi internasional. Yang kemudian dapat menghasilkan sebuah perkembangan ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan. Selain itu juga ada kerjasama jaringan keterkaitan politik-militer yang bertujuan untuk mencapai kepentingan lintas batas. Yang kemudian dapat memberikan keamanan dan perlindungan. Untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencegah konflik tidak hanya bergantung dari dalam negara saja namun juga ada pengaruh dari sistem internasional. Sehingga konflik Papua jika terus berlarut-larut dan dibiarkan dapat menyebar kepada negara-negara luar dan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara yang terlibat.

politik dan partisipasi politik.<sup>33</sup>. Teori PSC memiliki empat variable : ‘Communal Content’, ‘Deprivation of human needs’, ‘Governance and the state’s role’, dan ‘International Linkages’.<sup>34</sup>

Pertama adalah *Communal Content*. Yang dianalisa oleh Azar disini adalah identitas sebuah kelompok yang dilihat berdasarkan ras, agama, etnis, budaya dan sebagainya. Permasalahan utamanya terfokus kepada hubungan antara kelompok minoritas dengan pemerintah. Beberapa negara merupakan negara dengan

---

<sup>32</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse, Tom. *ibid.* Hlm 74

<sup>33</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse, Tom. 2011. *Contemporary Conflict Resolution: Third Edition*. United Kingdom: Polity. Hlm 71

<sup>34</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse. *Ibid.* Hlm 72

penduduk multietnis, dan di dalamnya terdapat kelompok mayoritas dan kelompok minoritas seperti contohnya Indonesia yang merupakan negara multietnis karena memiliki beragam suku. Kelompok mayoritas di Indonesia adalah suku Jawa sedangkan kelompok minoritas adalah suku Papua – Alasannya adalah karena jumlah penduduk Papua yang tidak sebesar suku Jawa. Poin pertama teori Azar atau *CommunalContent* ini menjelaskan bahwa kelompok mayoritas tersebut kemudian mendominasi segala aspek yang ada di dalam sebuah negara serta kemudian mengacuhkan/tidak merespon kebutuhan kelompok lain/minoritas didalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga yang seringkali terjadi adalah terjadi perpecahan diantara kelompok masyarakat di dalam sebuah negara.<sup>35</sup>

Kedua adalah *deprivation of human needs*. Tidak seperti kepentingan, kebutuhan (needs) merupakan sebuah keharusan dan tidak dapat di negosiasi. Sehingga harus dipenuhi dan tidak dapat dihindari.<sup>36</sup> Jika terjadi konflik maka kemungkinan dipastikan akan selalu intens, ganas dan irasional. Azar kemudian mengutip kebutuhan dalam beberapa hal yakni keamanan, perkembangan, akses pada politik, dan pengakuan identitas. Selain itu juga 3 hak dasar sebagai manusia harus dipenuhi seperti keamanan, kehidupan dan kebebasan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah rakyat Papua tidak terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya tersebut. Seperti contohnya, belum terlihatnya kebebasan berserikat dalam berpolitik, belum terciptanya penghidupan yang layak secara optimal dan merata, kurang terpenuhinya sarana infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan

---

<sup>35</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse. Ibid. hlm 73

<sup>36</sup> Situmorang, Mangadar. 2012. Oase Gagasan Papua Damai. Imparsial: Jakarta. Hlm 206.

perekonomian secara menyeluruh, tingkat kebahagiaan rakyat Papua yang masih rendah akibat belum diperolehnya layanan kesejahteraan yang memadai.<sup>37</sup> Rakyat Papua juga membutuhkan pengakuan dan penghormatan atas identitasnya dalam masyarakat Indonesia.<sup>38</sup>

Ketiga adalah *Governance and the state's role*. Poin ini dapat mengindikasikan tingkat kepuasan atau frustrasi kebutuhan suatu kelompok masyarakat. Kebanyakan dari negara yang mengalami PSC cenderung adalah negara yang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Pemerintah diharuskan untuk mendapat kepercayaan masyarakatnya dan dapat memimpin negaranya secara efektif lalu memperlakukan seluruh anggota politik secara adil dan sama serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi namun untuk poin ini tidak terimplementasi di Indonesia karena mayoritas hanya suku Jawa yang berpartisipasi dalam politik sedangkan suku Papua hampir tidak memiliki akses terhadap politik, dan selanjutnya adalah monopoli kekuatan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas dan membatasi akses kelompok minoritas dapat mempercepat krisis legitimasi. Sehingga pemerintah di haruskan untuk lebih memperhatikan kepada poin-poin yang sudah di jabarkan diatas untuk menghindari adanya konflik etnis.<sup>39</sup>

Terakhir dari teori PSC adalah *International Linkages*. Dibagian ini dianalisa bahwa diantara negara ada hubungan kerjasama dalam bidang politik-ekonomi dan ketergantungan ekonomi didalam sistem ekonomi internasional. Yang kemudian

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Situmorang, Mangadar. Loc.cit. hlm 207.

<sup>39</sup> Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse, Tom. ibid. Hlm 74

dapat menghasilkan sebuah perkembangan ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan. Selain itu juga ada kerjasama jaringan keterkaitan politik-militer yang bertujuan untuk mencapai kepentingan lintas batas. Yang kemudian dapat memberikan keamanan dan perlindungan. Untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencegah konflik tidak hanya bergantung dari dalam negara saja namun juga ada pengaruh dari sistem internasional. Sehingga konflik Papua jika terus berlarut-larut dan dibiarkan dapat menyebar kepada negara-negara luar dan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara yang terlibat.

Konflik internal bukan hanya konflik etnik begitupun sebaliknya konflik etnik tidak hanya terbatas pada hubungan internal. Konflik etnis bisa menyebar dengan cepat jika terus berlarut-larut. Menurut Lake and Rothchild, ada dua jenis konflik internal yaitu *diffusion* dan *escalation*. *Diffusion* adalah kondisi dimana konflik internal yang tidak dapat diselesaikan dapat mempengaruhi/merambat hingga ke negara lain (konflik menjadi menyebar luas hingga mancanegara), sedangkan *escalation* adalah situasi dimana negara lain yang justru ikut campur tangan ke dalam konflik internal.<sup>40</sup>

Konflik internal dianggap sebagai bentuk sifat yang rasional dan tidak dapat dihindari sehingga kondisi tersebut harus bisa dipahami. Namun ada bias ethnosentris dari pernyataan tersebut, konflik etnis dinyatakan sebagai produk dari kebencian irasional. Kemudian juga klaim yang menyatakan konflik etnis irasional

---

<sup>40</sup> David A. Lake and Donald Rothchild. 1998. *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation*. New Jersey: Princeton University Press.

menganggap bahwa konflik etnis muncul lebih *chaotic* dibanding dengan yang dipikirkan.

Di dalam Konflik internal terdapat 2 jenis interaksi konflik etnis, yaitu *inter-state* dan *intra-state*. *Inter-state conflict* adalah konflik yang menyeret pertikaian antar Negara dan melampaui batas Negara sedangkan *intra-state conflict* adalah konflik antar pihak dalam negeri yang dampaknya tidak melampaui batas-batas Negara. Kesamaan dari kedua hal tersebut adalah melibatkan kelompok-kelompok masyarakat seperti agama, ras dan budaya yang dapat menjadi ancaman bagi sebuah negara.

Penyebab adanya konflik etnis adalah karena adanya tekanan dalam jangka waktu yang lama yang dilakukan oleh pemerintah atau oknum pejabat atau militer kepada suatu kelompok masyarakat yang kemudian tekanan yang berlangsung secara terus menerus tersebut dapat berubah menjadi sebuah pemberontakan yang akan berakibat pada kekerasan.

Konflik yang tidak dapat terselesaikan dapat merambat dan mempengaruhi negara-negara luar. Untuk mencegah hal ini terjadi, komunitas internasional dapat bertindak. Jika tidak dapat/tidak berhasil mencegah konflik yang menyebarluas, maka setidaknya komunitas internasional dapat membuat situasi lebih baik dan aman bagi para *refugees* dan warga sipil. Konsensus tercapai pada sebuah poin : apapun penyebabnya, konflik etnis pasti memiliki kecenderungan untuk menyebar dan ini menimbulkan ancaman yang nyata bagi perdamaian dan stabilitas di banyak wilayah di dunia.

Selanjutnya, Pada bab II Penulis akan membahas mengenai. Diaspora adalah penduduk etnis manapun yang meninggalkan tanah air dan bermukim di negara lain. Artinya, mereka tersebar di berbagai negara di belahan dunia. Tujuan diaspora meninggalkan tanah airnya ada bermacam-macam : bisa karena terpaksa meninggalkan tanah air untuk memperjuangkan kepentingannya, bisa pula untuk mencari pekerjaan di luar atau mendapat pekerjaan di negara lain, ada pula yang bermukim di negara lain karena terpaksa. Diaspora Papua termasuk ke dalam diaspora yang meninggalkan tanah air untuk memperjuangkan kepentingan dan tujuannya yaitu untuk mencari simpati negara lain untuk memperoleh dukungan dari negara tersebut untuk Papua merdeka. Karena diaspora-diaspora Papua inilah maka isu Papua yang awalnya merupakan isu domestik berevolusi menjadi isu internasional.<sup>41</sup>

Internasionalisasi, secara umum yang didefinisikan sebagai proses melalui mana keputusan eksplisit dan sadar dibuat: keputusan untuk melibatkan pelaku internasional dalam segala pertentangan atau negosiasi – berawal dari konflik domestik. Keputusan untuk melakukan internasionalisasi (atau tidak) dapat dilakukan oleh agen yang berbeda, dapat dimulai atau bahkan dipaksa oleh aktor eksternal (negara hegemonik) atau dapat dibuat oleh pihak lokal dalam konflik. Dengan kata lain, konsep internasionalisasi bergerak sepanjang rangkaian di mana pada satu ekstrem, aktor eksternal seperti negara kuat atau negara tetangga, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah dapat memutuskan untuk

---

<sup>41</sup> Cohen, Robin. 1996. International Affairs. *Diasporas and the State : From victims to challengers (online)*. Vol. 72 No. 3. Oxford University Press : Royal Institute of International Affairs. Hlm 507-520.

berpartisipasi secara sepihak atau aktor domestik yang memiliki konflik internal yang kemudian berupaya menarik dukungan negara-negara tetangga dan menginternasionalisasi konfliknya. Internasionalisasi, yang didefinisikan secara umum, adalah proses melalui mana keputusan eksplisit dan sadar dibuat: keputusan untuk melibatkan pelaku internasional dalam segala tahap-permusuhan atau negosiasi - dari konflik domestik. Strategi alternatifnya adalah mengisolasi konflik internal dan secara sadar mengecualikan pelaku internasional.

Dalam skenario ini, internasionalisasi mengambil bentuk intervensi. Di sisi lain, pihak-pihak dalam konflik membuat keputusan ini. Mereka mengundang pelaku eksternal dengan tipe yang sama, yaitu, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam konfrontasi mereka sendiri. Dengan nada yang sama, pada satu ekstrem, pelaku internasional dapat memutuskan untuk tidak ambil bagian atau campur tangan dalam konflik internal tertentu, dan di sisi lain, partai lokal dapat memilih untuk menghalangi atau menghindari partisipasi internasional. Mereka mengundang pelaku eksternal, seperti organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam konfrontasi mereka sendiri. Pelaku internasional dapat memutuskan untuk tidak ambil bagian atau campur tangan dalam konflik internal tertentu, dan di sisi lain, partai lokal dapat memilih untuk menghalangi atau menghindari partisipasi internasional.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Borda, Sandra P. 2009. *The Internationalization of Domestic Conflicts: A Comparative Study of Colombia, El Salvador and Guatemala*. Minneapolis, USA. Doctorate of Philosophy: The University of Minnesota. hlm 6-7.

Selanjutnya ada teori dari internasionalisasi. Penelitian Penulis memperlakukan internasionalisasi sebagai variabel dependennya karena penulis lebih tertarik untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menjelaskan kapan, bagaimana dan mengapa internasionalisasi terjadi dibandingkan jika memeriksa dampak proses internasionalisasi itu sendiri. Di sini, penulis telah menganalisis literatur Gleditsch yang mengidentifikasi penjelasan tentang munculnya proses internasionalisasi di dua sub kelompok yaitu faktor domestik dan internasional :

### **Faktor Domestik**

Dalam faktor domestik, Gleditsch menyatakan terjadinya eksternalisasi dimana para pemberontak melarikan diri ke negara-negara asing atau pergi lintas negara dengan tujuan menghindari represi dan mencari dukungan bagi kepentingannya. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan tindakan perlawanan kepada negara-negara yang menerima serta memberi dukungan kepada para pemberontak yang ada di negaranya tersebut. Selain itu, pemerintah yang sedang mengalami perang saudara juga dapat melakukan serangan kepada negara-negara yang menerima dan memberi dukungan kepada para pemberontak yang berpindah ke negara nya tersebut. Serangan dilakukan dengan harapan agar negara penerima dapat menarik dukungannya dari pemberontak tersebut.

Walaupun teori domestik menurut Gleditsch ini lebih menekankan kepada perang namun negara juga dapat mempengaruhi negara lain yang dimasuki pemberontak negaranya dengan melakukan kerjasama dan berunding untuk menarik dukungan negara tersebut dalam mendukung pemberontak. Faktor domestik



berikutnya adalah konflik etnis mengakibatkan adanya gerakan etnis yang cenderung membangun aliansi dengan kelompok-kelompok sejenis di berbagai negara. Contohnya adalah Papua yang memiliki etnis Melanesia yang kemudian membangun aliansi dan menarik dukungan dari negara-negara berpenduduk Melanesia lainnya seperti Vanuatu, Fiji, Nauru, dsb. Adanya perbedaan etnis di dalam sebuah negara menyebabkan timbulnya perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas sehingga seringkali kaum minoritas kemudian merasa tidak diakui identitasnya dan mencari dukungan pada negara-negara lain yang memiliki identitas sejenis dengannya .

### **Faktor Internasional**

Dalam faktor internasional dapat disimpulkan adanya motivasi pelaku eksternal dalam konflik domestik dan tujuan dari intervensi mereka. Pelaku eksternal mendukung kelompok pemberontak dengan berbagai alasan : karena mereka ingin melemahkan negara penyaing mereka dan menghilangkan sumber daya mereka, kedua karena mereka ingin menghilangkan pemerintah yang jenis rezimnya bersebrangan dengan mereka, dan yang ketiga adalah jika ini merupakan konflik separatis dan kelompok separatisme tersebut memiliki kesamaan dengan mereka maka mereka dapat melindungi dan mendukung kerabat etnis mereka tersebut dari penindasan.<sup>43</sup> Jika dikaitkan dengan isu Papua maka alasan terkuatnya negara-negara Melanesia mendukung separatisme Papua adalah karena Papua dianggap memiliki kesamaan etnis dengan negara-negara di Melanesia sehingga mereka sangat mendukung Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Selain itu, Negara-negara

---

<sup>43</sup> Borda, Sandra P. *ibid.*

beretnis Melanesia memiliki kesamaan sejarah dan ideologi. Mereka merupakan Negara-negara yang terjajah dan ingin melepaskan diri dari penjajahan. Kebebasan, kemandirian dan kemerdekaan dijadikan tujuan mereka untuk menjadi negara yang berdaulat tanpa campur tangan penjajah. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan persaudaraan Melanesia menjadi ideology kolektif yang terus digaungkan secara internasional untuk mendapatkan pengakuan internasional.

### **1.8 Metode Penelitian**

Sebelumnya, telah dituliskan beberapa teori, konsep dan pendekatan untuk penelitian ini. Didalam sub bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai untuk meneliti. Metode yang dipakai penulis adalah metode penelitian kualitatif dan didalam bab ini juga peneliti akan menjelaskan bagaimana melakukan pengumpulan data.

#### **1.8.1 Metode Penelitian Kualitatif**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang diartikan sebagai proses untuk menganalisis data dan memahami fenomena-fenomena sosial melalui gambaran yang lengkap, dibentuk dengan kata-kata menghasilkan laporan secara lengkap dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.<sup>44</sup> Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah dimana peneliti sebagai seseorang yang menganalisis datanya dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan atau triangulasi, yang

---

<sup>44</sup> Creswell, John W. 2003. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California, United States. SAGE Publications. hlm 5.

pada akhirnya akan menghasilkan penelitian kualitatif yang menyajikan sebuah data dan makna tertentu.

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif membuat pengetahuan didasari oleh pandangan yang konstruktif, cara pandang seseorang dalam melihat fenomena baik secara sosial dan sejarah dilihat dari teori, atau dilihat dari perspektif advokasi dan partisipan. Creswell mengungkapkan adanya jenis-jenis tradisi dari penelitian, yaitu etnografi, *grounded theory*, *case study*, penelitian fenomenologi dan penelitian naratif.<sup>45</sup>

Selain itu Bogdan dan Taylor juga mendefinisikan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti dapat membangun suatu pandangan yang kompleks, gambaran yang holistik, analisis kalimat, melaporkan secara rinci dari pandangan informan dan menghubungkan studi dengan latar yang natural.<sup>46</sup>

Menurut Creswell penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi, pandangan umum dan penggunaan yang memungkinkan dari lensa teori dan mencari tahu arti dari anggapan yang berasal dari individu dan kelompok terhadap suatu masalah sosial. Dalam definisi ini, Creswell menekankan pada proses penelitian yang berjalan mulai dari asumsi filosofis kepada pemikiran-pemikiran melalui lensa teori dan dalam prosedurnya yang ada, dalam mempelajari masalah sosial atau manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Creswell. Ibid. Hlm 21.

<sup>46</sup>Ibid. hlm 15.

<sup>47</sup>Ibid. hlm 37.

### **1.8.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan sumber tertulis berupa: buku, majalah, jurnal dan surat kabar serta referensi dari internet yang dianggap kompeten untuk dijadikan sumber dan bahan untuk penulisan. Setelah melakukan pengumpulan data penulis melakukan pengolahan data dan penyusunan data yang berlandaskan pada teori-teori yang penulis gunakan yaitu teori dari Michael E Brown dan Gledistch juga gabungan dari beberapa teori tambahan lainnya seperti teori Azar, sehingga akan diperoleh fakta yang secara sistematis dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Bab 1 adalah pendahuluan. Dalam bab ini Penulis membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, pembatasan masalah, literatur review, kerangka pemikiran, dan metoda penelitian.

Pada Bab 2 yang berjudul konflik Papua : Isu dan Aktor-aktor yang terlibat Penulis akan membahas mengenai Kronologis dan Sejarah isu Papua serta Aktor-aktor yang terlibat didalam proses internasionalisasi konflik Papua.

Pada Bab 3 yang berjudul faktor domestik dan faktor internasional dalam internasionalisasi konflik Papua Penulis akan membahas mengenai Faktor pemicu internasionalisasi konflik Papua dimulai dengan pembahasan teori Gleditsch mengenai faktor domestic dan internasional internasionalisasi konflik. Pertama penulis akan membahas faktor domestik teori gleditsch yang kemudian akan di sambungkan dengan fakta-fakta konflik Papua dilanjutkan dengan faktor

internasional teori Gledistch disambungkan juga dengan fakta-fakta konflik Papua yang dimana kemudian akan menjelaskan bagaimanakah faktor-faktor tersebut dapat menjadi pemicu internasionalisasi konflik Papua.

Bab terakhir adalah bab 4. Pada bab 4 Penulis akan menyimpulkan dan merangkum seluruh laporan dan analisa yang sudah penulis susun dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **KONFLIK PAPUA : ISU DAN AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT**

Pada Bab 2 ini penulis akan membahas mengenai isu dalam konflik Papua, kronologis kejadian, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Pada bagian pertama, penulis akan membahas isu Papua serta 4 persoalan konflik Papua, dilanjutkan dengan menjabarkan sejarah konflik Papua dari asal mula pertama muncul hingga bagaimana konflik tersebut berkembang, dan pada bagian akhir